Penerapan Prinsip Solidaritas Sosial Menurut Emile Durkheim Dalam Kasus Haris Azhar Dan Fathia

Witri Safitri; Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dewi.gustini@unpas.ac.id

ABSTRACT: The process of handling human rights violations should be a concern for the Government and law enforcement officials because this is a mandate from the Constitution. Human Rights are rights given by God Almighty which are natural, which means they are basic rights owned by a human being which are owned from birth to death and cannot be taken away by other people. Qualitative research methods are used for several research activities related to community life, history, behavior, organizational functionalization, social and economic activities. The results of qualitative research activities can be in the form of in-depth descriptions of speech, writing, and/or behavior that can be observed from a particular individual, group, society, and/or organization which is studied from a comprehensive perspective. In Indonesia there are already regulations regarding Human Rights in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts as material law in upholding Human Rights. Social solidarity is a condition of relationships between individuals and other individuals or groups and other groups which are based on moral feelings and shared beliefs which are strengthened by shared emotional experiences. In this case, the moral and social togetherness that is borne is to stop the criminalization and silencing of freedom of expression experienced by victims because it is feared that in the future many similar things will happen, especially to civil society. Freedom of opinion must be upheld in a democratic country as a form of social control over the government. An awareness of solidarity in controlling the government is needed to prevent absolute power from occurring.

KEYWORDS: Human Rights, Social Solidarity, Law.

ABSTRAK: Proses penanganan pelanggaran HAM sudah seharusnya menjadi concern bagi Pemerintah dan juga aparat penegak hukum karena hal tersebut sudah menjadi amanat dari Konstitusi. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa yang bersifat Kodrati yang berarti itu merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seorang manusia yang telah dimiliki sedari lahir hingga meninggal dunia dan tidak dapat direnggut oleh orang lain. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk beberapa kegiatan penelitian terkait dengan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, ekonomi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh. Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai hukum materiil dalam penegakan Hak Asasi Manusia. solidaritas sosial ialah suatu kondisi hubungan antara individu dengan individu lainnya atau kelompok dengan kelompok lainnya yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Dalam hal ini kebersamaan moral dan sosial yang ditanggung ialah memberhentikan kriminalisasi dan pembungkaman kebebasan berpendapat yang dialami oleh korban karena dikhawatirkan dikemudian hari banyak hal serupa terjadi khususnya kepada masyarakat sipil. Kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi dinegara demokrasi sebagai bentuk social control kepada pemerintah. Adanya kesadaran solidaritas akan controlling terhadap pemerintah dibutuhkan agar tidak terjadi sebuah kekuasaan yang absolut.

KATA KUNCI: Hak Asasi Manusia, Solidaritas Sosial, Hukum

I. PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan extraordinary crime yang masih menjadi permasalahan sampai dengan sampai saat ini. Bukan hanya masih terjadi, tetapi masih ada pelanggaran HAM dimasa lampau khususnya orde baru masih belum dapat diselesaikan. Proses penanganan pelanggaran HAM sudah seharusnya menjadi concern bagi Pemerintah dan juga aparat penegak hukum karena hal tersebut sudah menjadi amanat dari Konstitusi. “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” merupakan kalimat yang menjadi amanat dari Konstitusi bahwa penegakan HAM harus diselesaikan.

Sejatinya, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa yang bersifat Kodrati yang berarti itu merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seorang manusia yang telah dimiliki sedari lahir hingga meninggal dunia dan tidak dapat direnggut oleh orang lain yang meliputi life, liberty dan property yang berarti berlaku untuk siapa saja dan dimana saja (Universal). Saat ini banyak gerakan solidaritas kemanusiaan dalam upaya menegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Banyaknya aksi gerakan solidaritas tersebut dikarenakan masyarakat memiliki keresahan yang sama terkait banyaknya penegakkan HAM yang tidak sesuai prosedur atau dapat dikatakan “Abuse of Power” dari pihak tertentu khususnya para penguasa. Adanya gerakan solidaritas sosial tersebut upaya kesetiakawanan dalam meneggakan tanggungjawab bersama dan kepentingan bersama (M Syaufin S, 2015).

II. METODE

Menurut Lexy J. Moleong (2005) metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Termasuk dengan menjelaskan tingkah laku, persepsi, motivasi, tingkah laku, dan lain-lain secara keseluruhan, dari segi bahasa dan dalam konteks alam tertentu, dengan menggunakan berbagai metode alam.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk beberapa kegiatan penelitian terkait dengan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, ekonomi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh (I Made Laut Mertha Jaya, 2020). Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat.

III. HASIL

Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai hukum materiil dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Konstitusi yang menjadi payung hukum tertinggi pun mengatur terkait dengan Hak Asasi Manusia ini didalam Pasal 28I. Lebih lanjut lagi kita dapat membedakan perbedaan Hak didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis hak konstitusional yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara dimana hak asasi manusia merupakan bentuk komitmen serta tanggung jawab negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi setiap warga negara tanpa melihat darimana ia berasal dan ini bersifat universal dengan ditandai didalam Undang-Undang 1945 dengan kalimat “Setiap Orang”. Lalu, hak warga negara adalah hak istimewa yang dimiliki secara khusus oleh warga negara indonesia secara khusus dan ditandai dengan kalimat “Setiap Warga Negara” (Bivitri Susanti, 2023).

Menurut Doyle Johnson (1994) Solidaritas merupakan suatu keadaan hubungan antara Individu maupun kelompok yang didasarkan pada keadaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Sedangkan menurut

Emille Durkheim Solidaritas merupakan perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok maupun komunitas yang mendorong menjadi kesetiawanan, saling menghormati, serta bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan sesamanya.

IV. PEMBAHASAN

A. Biography Emile Durkheim

David Emile Durkheim lahir di Epinal, Perancis pada tanggal 15 April 1858. Ibunya bernama Melanie yang merupakan seorang pedagang kuda. Ayahnya bernama Moise merupakan seorang Rabu yang biasa kita kenal dengan guru atau ahli agama didaerahnya. Karena ayahnya seorang Rabi, Emile ketika muda banyak diasumsikan bahwa ia akan menjadi penerus sang ayah untuk menjadi Rabi. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang mana Emile memutuskan hubungan dengan agama sama sekali. Walaupun ia memutuskan hubungan dengan agama ia tetap menjadi bagian dari komunitas Yahudi. Pada tahun 188, ia menikah dengan seorang penyulam muda bernama Louise Julie Dreyfus seorang putri seorang direktur pengecorandan mereka memiliki dua anak yang bernama Marie Bella (lahir 1888) dan Andre-Armand (lahir 1892). Emile Durkheim meninggal di usia 59 tahun karena stroke yang dipicu dengan kematian sang putra yaitu Andre yang disebabkan pertempuran di Bulgaria.

Ada beberapa fakta unik tentang Emile Durkheim yang diantaranya; 1) Semasa menjalani masa pendidikan ia merupakan siswa yang berprestasi 2) Dia sangat dekat dengan keluarga dan komunitasnya 3) Ia sangat dikenal oleh berbagai kalangan cerdas, terutama di kalangan filsafat dan psikologi dan merupakan seorang pendebat yang baik yang mendedikasikan hidupnya pada ilmu sosiologi 4) Emile merupakan seorang administrator, organisator, dan dosen yang sangat baik dan memberikan bantuan kepada teman dan pendukungnya bahkan ia seringkali dituduh terlalu mengontrol pikiran mahasiswa mudanya karena pesonanya dan 5) Emile mendukung perjuangan republik yang

menentang dimulainya kembali sistem monarki dan mendukung reformasi Republik Ketiga.

Durkheim memperoleh gelar dari perguruan tinggi setempat pada tahun 1874 dan 1875 ketika ia masih berumur 17 tahun. Pada usia itu, dia ingin menjadi profesor perguruan tinggi, dan satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan menghadiri *École Normale Supérieure*, di Paris. Namun, butuh waktu dua tahun sebelum dia lulus ujian masuk yang diperlukan untuk masuk ke institusi bergengsi. Ia diterima di kalangan intelektual dan banyak berkontribusi dalam perdebatan. Ia berteman dengan banyak filsuf, sejarawan, dan psikolog. Setelah lulus pada tahun 1883 ia mengambil mengajar di Bourdeaux, bersama keluarganya yang sedang berkembang hingga tahun 1902. Pada tahun 1892 ia kembali sebentar ke Paris di mana ia memperoleh gelar PhD (untuk Divisi Tenaga Kerja). Pada tahun 1902, ia pindah ke Paris secara permanen untuk mengajar di Sorbonne, di mana ia melanjutkannya hingga kematiannya pada tahun 1917. Ia berbuat banyak untuk menciptakan bidang sosiologi di Perancis, sebagian besar dengan mengawasi jurnal sosiologi, *L'Année Sociologique*, dan dengan membantu memajukan karir sosiolog muda. Ia juga merupakan editor penasehat pada jurnal sosiologi AS yang pertama, *The American Journal of Sociology*.

Durkheim hidup dan bekerja pada masa Republik Ketiga, suatu periode yang relatif stabil di Perancis pada saat itu. Durkheim secara aktif terlibat dalam mendukung Republik Ketiga dan melihat sosiologi sebagai ilmu yang dapat menghasilkan pengambilan kebijakan yang lebih baik. Ia juga seorang kritikus antisemitisme yang terang-terangan dan sangat bersimpati dengan sosialisme. Selama Perang Dunia I, ia aktif mendukung Perancis dan bahkan menulis serangkaian artikel pendek yang mengancam "Pikiran Jerman" karena kecenderungannya terhadap militerisme dan penjangkauan yang berlebihan. Durkheim berkeinginan ilmu sosiologi dapat diakui sebagai disiplin ilmu yang penting, berbeda dengan ekonomi, politik, psikologi, sejarah, atau filsafat. Durkheim mengabdikan karirnya untuk mewujudkan hal ini dan memandang

bahwa ilmu sosiologi ydapat memberikan dampak praktis seperti arah kebijakan yang lebih baik.

B. Teori Solidaritas oleh Emile Durkheim

Berdasarkan terminologis solidaritas bersumber dari bahasa Latin yaitu *solidus* yang berarti solid yang mana sebagai bentuk dari masyarakat yang memiliki kerjasama dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemudian, secara istilah solidaritas sosial merupakan rasa kesetiakawanan hubungan antar sesama manusia. kesetiakawanan dalam sosial dapat diartikan bahwa adanya hubungan persahabatan yang didasarkan atas kepentingan dari para anggotanya. Artinya, solidaritas sosial sebagai suatu hubungan persahabatan dengan menegakkan rasa tanggungjawab bersama dan kepentingan bersama (M Syaufin S, 2015).

Lalu, Durkheim melihat bahwa masyarakat merupakan tempat yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia, sesuatu yang berada di atas segala-galanya (Muhni, 1994). Durkheim menjelaskan dalam bukunya *The Division of Labor In Society* bahwa terdapat 2 (dua) jenis mayarakat yang diantaranya masyarakat sederhana serta masyarakat modern. Perbedaaan dari kedua jenis masyarakat tersebut terletak pada “fungsi dari pembagian kerja”. Fungsi pembagian kerja dalam masyarakat sederhana bersifat mekanis, sedangkan fungsi pembagian kerja dalam masyarakat modern bersifat organik. Yang dimaksud dengan masyarakat sederhana bersifat mekanik karena kenyataan yang disebabkan faktor individu yang mempunyai hubungan pekerjaan yang sama kemudian mereka berbagi pengalaman yang sama lalu memiliki nilai yang sama yang artinya bmereka hidup dengan usaha mencukupi kebutuhan sendiri dan dengan pekerjaan yang sama. Sedangkan pembagian kerja dalam masyarakat modern bersifat organik tidak diikat oleh kesamaan antara orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sama, akan tetapi pembagian kerjalah yang mengikat masyarakat dengan memaksa mereka agar tergantung satu sama lain. Bahwa fungsi sesungguhnya dari pembagian kerja adalah untuk

menciptakan solidaritas antara dua orang atau lebih (Ritzer dan Goodman, 2010)

Durkheim mengatakan bahwa masyarakat merupakan hasil dari sebuah kebersamaan. Lalu, disebut dengan solidaritas sosial ialah suatu kondisi hubungan antara individu dengan individu lainnya atau kelompok dengan kelompok lainnya yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama (Johnson, 1988). Kemudian, Emile Durkheim membagi solidaritas sosial menjadi 2 (dua), yang pertama adalah solidaritas mekanis yang berarti ikatan dalam masyarakat yang terbangun karena terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama dan didasarkan kebersamaan moral dan sosial. Yang kedua ialah masyarakat organis yaitu hubungan antara masyarakat yang didalamnya bertahan karena perbedaan didalamnya.

C. Hubungan Teori Solidaritas Sosial dengan Kasus Haris Azhar dan Fathia

Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ialah seorang aktivis Hak Asasi Manusia yang cukup terkenal di Indonesia. Haris Azhar merupakan salah satu pendiri Lokataru dan menjabat sebagai direktur eksekutif dimana Lokataru Foundation ini aktif dalam menanggapi persoalan terkait Hukum dan HAM hingga saat ini. Sebelum mendirikan Lokatari Foundation, Haris Azhar bergabung dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) sejak 1999 dimana ia banyak membantu langsung mendampingi korban kasus pelanggaran HAM. Sedangkan Fathia Maulidiyanti merupakan koordinator KontraS periode 2020 hingga 2023. Sebelum menjadi koordinator KontraS ia pernah menjadi Kepala Divisi Advokasi Internasional yang terlibat dalam melanjutkan kegiatan advokasi nasional pada beberapa kasus ke ranah internasional, baik melalui mekanisme resmi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) maupun melakukan advokasi jejaring internasional yang ditujukan untuk kampanye, seperti pada kasus Munir, kebebasan

sipil, isu ekonomi, sosial, dan budaya, serta isu hak asasi manusia lainnya (Balqis Fallahnda, 2024).

Pada 22 September 2021, Haris dan Fatia dilaporkan oleh Luhut ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dimana kasus tersebut bermula dari viralnya video yang dirilis oleh siniar perbincangan di channel YouTube Haris Azhar berjudul "Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada! >NgeHAMtam". Kasus Haris dan Fatia menyedot perhatian publik terutama di kalangan aktivis. Berbagai kalangan menilai bahwa kasus pencemaran nama baik itu menjejalkan hak kebebasan berpendapat yang mana hak tersebut telah dijamin oleh Undang-Undang 1945. Semenjak proses persidangan berjalan banyak aksi solidaritas dari kelompok maupun individu untuk mendukung Haris dan Fathia. KontraS sebagai lembaga yang concern akan hal pelanggaran HAM menyoroti bahwa UU ITE digunakan sebagai alat membungkam kritik serta menjadi senjata yang terus digunakan oleh penguasa untuk mengkriminalkan masyarakat sipil.

Pada dasarnya, kebebasan berekspresi telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Kebebasan berpendapat salah satu instrumen yang sangat penting dalam berdemokrasi hal tersebut ditujukan untuk terjaminnya perlindungan agar masyarakat tidak merasa khawatir ketika mengemukakan pendapat maupun kekurangan pada proses pemerintahan karena masyarakat merupakan salah satu social control. (Rahmat & Najid, 2001).

Adanya pemidanaan terhadap Haris Azhar dan Fathia memunculkan gelombang aksi solidaritas diberbagai daerah di Indonesia oleh berbagai dukungan kelompok maupun individu. Banyaknya aksi solidaritas tersebut selaras dengan Teori Solidaritas yang dikemukakan oleh Emile Durkheim yaitu "Solidaritas sosial ialah suatu kondisi hubungan antara individu dengan individu lainnya atau kelompok dengan kelompok lainnya yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman

emosional bersama”. Lalu, Solidaritas yang terjalin termasuk kedalam solidaritas mekanis yang berarti ikatan dalam masyarakat yang terbangun karena terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama dan didasarkan kebersamaan moral dan sosial. Dalam hal ini kebersamaan moral dan sosial yang ditanggung ialah memberhentikan kriminalisasi dan pembungkaman kebebasan berpendapat yang dialami oleh korban karena dikhawatirkan dikemudian hari banyak hal serupa terjadi khususnya menimpa kepada masyarakat sipil.

Banyak dari kelompok maupun individu yang mendukung Haris dan Fathia ini berasal dari LSM yang mempunyai concern yang tajam terhadap Pemerintahan, Demokrasi serta Hukum dan HAM. Sebagai salah satu contoh Koordinator Solidaritas Papua yang mengatakan bahwa tindakan atau kebijakan negara ini akan menimbulkan efek gentar dan menyebarkan ketakutan yang dapat membuat masyarakat enggan untuk menyampaikan pendapatnya, jelas-jelas tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan jauh dari standar HAM internasional (Hengky Yaimo, 2024). Lalu, Komnas HAM pun menyoroiti kasus ini dan berpendapat bahwa “kami telah menilai apa yang dilakukan Haris-Fatia sebagai bagian dari upaya yang dilakukan pembela HAM (human rights defender) menyampaikan isu yang jadi persoalan atau kepentingan publik” (Ady Thea DA, 2023). Hingga Amnesty Internasional pun membuat petisi sebagai bentuk dukungan terhadap kriminalisasi yang menjerat Haris dan Fathia. Keseluruhan dukungan tersebut didorong oleh fakta sosial yang terjadi. Fakta sosial itu pula yang mengikatkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pemberian hukuman atau sanksi dari suatu keadaan yang menyimpang dari apa yang telah diputuskan dan yang ditentukan oleh masyarakat-masyarakat tersebut.

V. KESIMPULAN

Fakta sosial yang terjadi dalam hal ini ialah pemidanaan yang dialami oleh Haris dan Fathia menciptakan kesadaran kolektif dari beberapa golongan masyarakat untuk memberikan bantuan terhadap mereka karena dirasa keadaan yang dialami korban menyimpang dari

nilai moral dan sosial yang dianut. Kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi dinegara demokrasi sebagai bentuk social control kepada pemerintah. Adanya kesadaran solidaritas akan controlling terhadap pemerintah dibutuhkan agar tidak terjadi sebuah kekuasaan yang absolut. Karena, sejatinya hukum bukanlah senjata untuk membungkam manusia, tetapi hukumlah yang mengontrol manusia agar tidak menyimpang dari norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ady Thea DA.(2023). Komnas HAM Beri Dukungan Moral Untuk Haris Fathia. Diakses di <https://www.hukumonline.com/berita/a/komnas-ham-beridukungan-moral-untuk-haris-fatia-lt656eb33a184d0/>
- I Made Laut Mertha Jaya. (2020). METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF . ANAK HEBAT INDONESIA.
- M. Syafin Soulisa (2015) “Aroha Sebagai Sarana Solidaritas Sosial: Studi Tentang Tradisi Keagamaan Masyarakat Negeri Hena Lima,” Jurnal Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah 9, no. 2
- Moleong Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasikal dan Modern (Jakarta;Gramedia Pustaka, 1994)
- Biography of Emile Durkheim. Diakses di <https://open.oregonstate.education/sociologicaltheory/chapter/biography-of-durkheim/>
- Imam Muhni, Djuretna (1994). Moral dan Religi Menurut Emile. Durkheim dan Henri Bergson. Yogyakarta: Kanisius. Ahmadi, Abu. 1999.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (Terjemahan Nurhadi). 2010. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmoder, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Doyle Paul Johnson (1990). Teori Sosilogi Klasik dan Modern Jilid II
- Rahmat, A., & Najid, M. (2001). Gerakan Perlawanan dari Majlis Kampus. Jakarta: Purimedia.
- Hengky Yaimo (2024). Solidaritas Papua Serukan Pembebasan Haris dan Fathia dari Jerat Hukum. Diakses di <https://jubi.id/polhukam/2024/solidaritas-papua-serukan-pembebasan-haris-dan-fatia-dari-jerat-hukum/>